

Melalui konstitusi dan perundang-undangan pemerintahan daerah yang berkali-kali mengalami perubahan kita bisa mengetahui bagaimana sejarah dan perjalanan sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan dijalankan di Indonesia. Begitu juga dengan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer dengan menerapkan demokrasi Pancasila, demokrasi Terpimpin, demokrasi liberal dan demokrasi di era reformasi. Secara lebih mendalam buku ini juga mengkaji tentang praktik desentralisasi ditinjau berdasarkan regulasi dan undang-undang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dikaitkan dengan hubungan pemerintahan pusat dan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), reformasi birokrasi dan kemandirian daerah di Indonesia. Melalui buku ini juga diuraikan tentang bagaimana praktik demokrasi lokal di Indonesia, berbagai permasalahan dan problem yang dihadapi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak, begitu juga dengan munculnya berbagai gejala oligarki model baru dan preferensi pemilih dalam praktik demokrasi. Begitu juga dengan praktik demokrasi mestilah melahirkan keteladanan dan pengorbanan dari para pemimpin dan semua pembangunan demokrasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, membangun masyarakat madani (*civil society*) dan masa depan bangsa dengan tantangan dan momentum strategis berupa bonus demografi yang terkandung pula di dalamnya persoalan penanganan lansia sebagai wujud Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat.

Penerbit:



ISBN 978-602-52023-8-4



Zulmasyhur Wahyu Triono KS

Catatan Praktik Desentralisasi & Demokrasi



Zulmasyhur
Wahyu Triono KS



Catatan Praktik **DESENTRALISASI &** **DEMOKRASI**

Catatan Praktik **DESENTRALISASI &** **DEM KRASI**

Penulis:
Zulmasyhur
Wahyu Triono KS

Penerbit:



Catatan Praktik **DESENTRALISASI &** **DEM KRASI**

Penulis:
Zulmasyhur
Wahyu Triono KS

ISBN: 978-602-52023-8-4

Penyelar Bahasa

dan Pemeriksa Aksara : Yusmiti Tarmizi

Disain Sampul/Layout : Wahyu Triono KS

Penerbit : Lembaga Edukasi dan Advokasi Demokrasi dan
Ekonomi Rakyat (LEADER)

Operasional Office : Bhayangkara No. 16A RT 02 RW 013
Pasir Gunung Selatan Cimanggis, Depok

Telp/Fax : 021-87717007/021-87717007

Website : www.cia.web.id

Email : leaderinfo1@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Zulmasyhur

Catatan praktik desentralisasi dan demokrasi / penulis, Zulmasyhur,
Wahyu Triono KS. – Depok: Lembaga Edukasi dan Advokasi Demokrasi
dan Ekonomi Rakyat (LEADER), 2020.

274 dan VI Hlm.; 22 cm

ISBN 978-602-52023-8-4

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Desentralisasi dalam pemerintahan. | 2. Demokrasi. |
| I. Judul | II. Wahyu Triono KS. |

352.283

Kata Pengantar Penulis

Reformasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia telah melahirkan ide dan pemikiran dasar yang menumbuhkan reformasi total di dalam segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Fokus utama reformasi total adalah untuk terciptanya masyarakat madani (*civil society*) dalam kehidupan berpemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang memiliki nilai-nilai *good governance* yang memunculkan nilai-nilai demokrasi dan sikap keterbukaan (*openness*), kejujuran (*honesty*), keadilan (*justice*) yang berorientasi kepada rakyat, serta bertanggung jawab (*akuntabel*) kepada rakyat.

Perjalanan dalam mewujudkan itu semua dilakukan dengan berbagai perubahan konstitusi yang berkali-kali antara lain adalah, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (1945), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Sementara (UUD RIS) 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Hasil Amandemen 1999-2002.

Dari kelima konstitusi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dilahirkanlah undang-undangan pemerintahan daerah di Indonesia antara lain adalah: 1) UU No. 1/1945; UU No. 22/1948; UU No. 1/1957; Penetapan Presiden No. 6/1959; UU No. 18/1965; UU No. 5/1974; 7) UU No. 22/1999; 8) UU No. 32/2004; dan 9) UU No. 23/2014. Melalui konstitusi dan perundang-undangan pemerintahan daerah itu kita bisa mengetahui bagaimana sejarah dan perjalanan sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan dijalankan di Indonesia. Begitu juga dengan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer dengan menerapkan demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal dan demokrasi di era reformasi.

Zulmasyhur dan Wahyu Triono KS

Secara lebih mendalam buku ini juga mengkaji tentang praktik desentralisasi ditinjau berdasarkan regulasi dan undang-undang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dikaitkan dengan hubungan pemerintahan pusat dan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), reformasi birokrasi dan kemandirian daerah di Indonesia.

Melalui buku ini juga diuraikan tentang bagaimana praktik demokrasi lokal di Indonesia, berbagai permasalahan dan problem yang dihadapi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak, begitu juga dengan munculnya berbagai gejala oligarki model baru dan preferensi pemilih dalam praktik demokrasi. Begitu juga dengan praktik demokrasi mestilah melahirkan keteladanan dan pengorbanan dari para pemimpin dan semua pembangunan demokrasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, membangun masyarakat madani (*civil society*) dan masa depan bangsa dengan tantangan dan momentum strategis berupa bonus demografi yang terkandung pula di dalamnya persoalan penanganan lansia sebagai wujud Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat.

Selamat membaca! Semoga buku ini menjadi referensi bagi para akademisi, intelektual dan praktisi yang ingin mengetahui dan mendalami konsep dan praktik desentralisasi dan demokrasi di Indonesia

Jakarta, April 2020

Penulis:

Zulmasyhur

Wahyu Triono KS

Daftar Isi

Kata Pengantar Penulis	III
Daftar Isi	V
Bagian Satu: Desentralisasi di Indonesia	1
1. Sejarah Perkembangan Desentralisasi	2
2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi	16
3. Desentralisasi di Era Reformasi	26
4. Sentralisasi, Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan	31
5. Desentralisasi di Era Globalisasi	55
Bagian Dua: Praktik Desentralisasi	59
1. Desentralisasi Dalam Tinjauan Regulasi dan Undang- Undang Pemerintahan Daerah	60
2. Desentralisasi Dalam Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah	76
3. Desentralisasi dan Pemerintahan yang Baik	82
4. Desentralisasi Dan Reformasi Birokrasi	107
5. Desentralisasi dan Kemandirian Daerah	136
Bagian Tiga: Demokrasi di Indonesia	154
1. Sejarah dan Perjalanan Demokrasi Di Indonesia	155
2. Sistem Pemerintahan Sendiri Dan Demokrasi Pancasila ..	165
3. Demokrasi Liberal Di Indonesia	186
4. Demokrasi Terpimpin Di Indonesia	193
5. Demokrasi Di Era Reformasi	203

Zulmasyhur dan Wahyu Triono KS

Bagian Keempat: Praktik Demokrasi Di Indonesia	207
1. Praktik Demokrasi Lokal Di Indonesia	208
2. Oligarki Mengancam Demokrasi Indonesia	224
3. Preferensi Pemilih Dalam Praktik Demokrasi	237
4. Demokrasi: Keteladanan Dan Pengorbanan Pemimpin	243
5. Demokrasi, Masyarakat Madani Dan Masa Depan Bangsa.	248
 Daftar Pustaka	 264
 Bio Data Penulis	 272

Daftar Pustaka

- Adioetomo, Sri Murtiningsih. Dkk. (2010). *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adioetomo, Sri Murtiningsih. (2005). *Bonus Demografi Menjelaskan Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi*” Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi UI. Jakarta: FE UI.
- Ali, Faried (1999). *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ali Farazmand, “Sound Governance in the Age of Globalization: A Conceptual Framework”, in Ali Farazmand, ed., *Sound Governance: Policy and Administrative Innovations*, Westport: Prager, 2004.
- Ananta Aris, *Ledakan Penduduk Lansia, Krisis Keuangan dan Kesejahteraan*, Seputar Indonesia.
- Anderson, Benedict R. O’G., (2006) *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. (Jakarta Indonesia, Equinox Publishing Indonesia.
- Andriansyah, Dr. M.Si., (2015). *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Analisa*. Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama. Jakarta.
- Anggara, Sahya. Dr., M.Si. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arghiros, D (2001) *Democracy, Development, and Decentralisation in Provincial Thailand*. Surrey: Surzon.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, BIP, Jakarta.
- Assiddiqie, Jimly. *Struktur Ketata Negara Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Makalah Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar 14-18 Juli 2003.

- BPS. (2014) Statistik Penduduk Lanjut Usia. Katalog BPS 4104001. Jakarta.
- Case, W (2002) *Politics in Southeast Asia: Democracy or Less*. Mitcaham, Surrey: Curzon.
- Cheema, G. Shabbir and Dennis A. Rondinelli. (2007). *Decentralizing Governance: Emerging Concept and Practices*. Brooking Institution Press: Washington, D.C.
- Cheema G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli (1983), *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Coun-tries*. Beverly Hills/London/New Delhi: sage publications.
- Coser, Lewis A. (1977) *Masters of Sociological Thought. Ideas in Historical and Social Context 2nd ed.*, Harcourt Brace Jovanovich, Inc.: New York, Chicago, San Fransisco, Atlanta.
- Cynthia Hewitt de Alcantara (ed). (1998) *Social Futures, Global Visions*. Oxford: Blackwell.
- Dahl, Robert A. (1971). *Poliarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press: New Heaven.
- Dianto, Bachriadi, dkk., Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pilkada Serentak 2015., (Jakarta, Komnas HAM RI, 2016).
- Dwiyanto, Agus. (2012) *Membangun Kapabilitas Birokrasi: Membentuk Aparatur Negara Yang Bersih, Mampu, dan Melayani. Reformasi Birokrasi: Pameran, Konferensi dan Pertemuan Pemangku Kepentingan 2012. Hotel Bidakara Jakarta, 27-29 Agustus 2012*.
- Effendi, Sofian, Prof. (2005). *Sistem Pemerintahan Adalah Jati Diri Bangsa*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Gie, The Liang. (1967). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jilid I. Jakarta: Gunung Agung.
- Goffman, Erving. 1959. *The Presentations of self in Everyday Life*. Doubleday Anchor Books & Company, Inc: New York.
- Grindle, M.S. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. *Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions*, 17 (4), 525-548. Dan Grindle, M.S. (2011). Good

- enough governance revisited. *Development Policy Review*, 29(1),199–221.
- Guruh LS, Syahda. (2000). Menimbang Otonomi vs Federal Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia, Rodakarya, Bandung.
- Hadiwijoyo, Suryo. (2011) Gubernur Kedudukan dan Peran-nya. Jogjakarta:Graha Ilmu.
- Hanif, Nurcholish, Enceng. (2018). Administrasi Pemerintahan Daerah. Buku Materi Pokok ADPU4440/3SKS/MODUL 1-9, Edisi 3. Penerbit Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
- Hatta, Mohammad. Dari Daulat Rakyat Ke Indonesia Merdeka. Dalam Jika Rakyat Berkuasa Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Fiodal, Tim MAULA (Eds), Pusataka Hidayah, Bandung, 1999.
- Hersey, Paul and Kenneth H. 1988, Blanchard, Management and Organizational Behavior (5th Ed.) utilizing human resources, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall.
- Hidayat, Syarif. (2016). Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoritis.Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan. Masyarakat Indonesia, Vo. 42, No. 2, Desember 2016.
- Hidayat, Syarif., *Demokrasi Elitis? Relasi Kekuasaan Pasca Pilkada.*, Media Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Volume: 23 - No. 3 Terbit : Juli 2010.
- Hidayat, Syarif., *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation.*, (Jurnal Poelitik Vol. 1 Np. 1, 2008).
- Hoessein, Benyamin. (1999). Landasan Filosofis tentang Pembentukan Daerah Otonom di Indonesia, IULA-ASPAC.
- Huda, Ni'matul. (2009). Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Nusamedia, 2009.
- Humes IV, Samuel. Local Government and National Power. London: IULA. 1991.
- Ikhsan, M. tanpa tahun. *Evaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten/Kota*. Diunduh dari <http://www.stialan.ac.id/artikel%20m%20ikhshan.pdf>

- Ilmar, Anwar. (2018). Demokrasi Terpimpin Dalam Pemikiran dan Praktik Politik. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta Vol. 4 No. 1 (Maret-Agustus 2018).
- Irawan, Benny Bambang. (2006). Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. Jurnal Hukum dan Masyarakat Vol. 5 No. 1 Oktober 2007.
- Kementerian PPN/BAPPENAS. (2013). Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi. Direktorat Evaluasi Kinerja Pemabangunan Sekto-ral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
- Keyfitz, Nathan. Dr dan Nitisastro Widjojo, Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia. (1954), Pustaka Ekonomi 1, TB Rahmah, Solo.
- Koswara, E (1999). Otonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat. Jakarta: Widya Praja HP.
- Kristiono, Natal. (2015). Buku Ajar Otonomi Daerah, Universitas Negeri Semarang.
- Kurniati, Poni Sukaesih. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia Pada Era Reformasi., Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume. III, No. 1/Desember 2013.
- Lembaga Administrasi Negara. (2010). *Buku Putih Reformasi Administrasi Negara*. Jakarta.
- Maddick, Henry (1963), *Democracy, Decentralization and Development*, London: Asia Publisihing House.
- Manan, Bagir. (2002). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Marzuki, M. Laica. (2005), Berjalanjalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki S.H., Jakarta, Konstitusi Press.
- Maslow, Abraham H. (1994). Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan manusia). Jakarta: PT. PBP.
- Mawhood P. (ed) (1987). *Local Government in The Third World: The Experience of Tropical Africa*, Chicheser: John Wiley&Sons.

- Nadapdap, Binoto. 2005. '*Pasang Surut Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.*' *Sociale Polites Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. V, No. 22.
- Nanda, V. P. (2006). Good Governance Concept Revisted. *ANNALS, AAPSS*, 603, 269-283.
- Ndraha. (2005). Keybernology, Sebuah carta pembaharuan, Sirao Credentia Center, Banten.
- Nurcholish, Hanif; Enceng. (2018). Administrasi Pemerintahan Daerah. Buku Materi Pokok ADPU4440/3SKS/MODUL 1-9, Edisi 3. Penerbit Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
- Nurcholish, Hanif. (2015). Otonomi Daerah di Indonesia: Bolak-Balik Antara Desentralisasi dan Sentralisasi. *Proceeding Simposium Nasional AsIAN V*, 7-9 Agustus 2015. Jurusan IAN FIS UNP Padang dan IPDN Kampus Baso Agam Sumatera Barat.
- Nuryanto, Yayuk. Drs., M.Pd., (2012) Cakap Berdemokrasi Ala Generasi Milenial. Buku Pengayaan Materi Pelajaran PKN. Penerbit Deepublish (Group Penerbit CV. Budi Utama), Yogyakarta.
- Oentarto, I Made Suwandi. (2004). Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Ohmae, Kenichi. (1990). *The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy*, New York, Harper Perennial.
- Ostrom, Vincent (1991), *The Mining of American Federalism: Constituting Self Governing Society*, San Francisco: ICS Press.
- Oyugi, WO (2000) *Decentralization for good governance and development: concepts and issues*. *Regional Development Dialogue* 21 (1).
- Parson, T. et al. (eds) (1961) *Theories of Sociology*, Glencoe: The Free Press.
- Piliang, Yasraf Amir. (1999). Jika Rakyat Berkuasa. Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal. Editor Tim Maula. Bandung: Pustaka Hidayah.

- Pratikno (2005) Good Governance dan Governability, Jurnal Sosial Politik, Vol. 8 No. 3, Maret 2005 (231-248).
- Romli, Lili. 2005. 'Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal.' *Analisis CSIS*, Vol. 34, No. 3.
- Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis & G. Shabbir Cheema (1983), *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*, Washington D.C.: The World Bank.
- Ruland, J. (1992) *Urban Development in Southeast Asia: Regional Cities and Local Government*, Boulder: Westview Press.
- Saafaroedin Bahar dkk. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sekretariat Negara, Jakarta 1992.
- Sharpe, L.J. (1981) Theories of Local Government, in L.D. Feldman (ed) *Political and Government of Urban Canada*, London: Methuen.
- Setiawan, Irfan. (2018). Handbook Pemerintahan Daerah. Penerbit Wahana Resolusi. Yogyakarta.
- Smith, B.C. (1985), *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: Asia Publishing House.
- Suwandi, Made. 2007. Pokok-pokok Pikiran; Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis dan Efisien). Jakarta: Ditjen Otda Depdagri.
- Utomo, Tri Widodo Wahyu. (2012). Sejarah Dekonsentrasi di Indonesia dan Agenda Kebijakan Kedepan. Jurnal Desentralisasi. Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah. Jakarta.
- Victor H. Vroom., (1964). *Work and Motivation*, (New York: John Wiley & Son, Inc.), dikutip tidak langsung oleh Malayu S.P. Hasibuan., *Organisasi dan Motivasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Wasistiono, Sadu, dkk. (2009). *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*. Fokusmedia. Bandung.

- Wiratraman, RH Perdana (2007) Good Governance dan Mitos Ketatanegaraan Neo-Liberal, Jurnal BERSATU: Mei 2008 (1-11).
- Wirdayanti, Agnes. Dr. S.IP.M.Si. (2017). Peran Ganda Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Depok: Penerbit LEADER.
- Weber, Max., Economy and Society, An Outline of Interpretative Sociology., Edited by Guenther Roth and Claus Wittich., (University of California Press, 1978).
- Weiss, Thomas (2000). 'Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges., Third world Quarterly Journal of Emerging Areas, Volume 21 No.5 october 2000.
- Winters, Jeffrey A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge, UK. Cambridge University Press.
- Yulaswati, Vivi. (2015) Perlindungan Sosial Lanjut Usia. Direktur Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. Depok.
- Zuhro, Siti. (2012). Pembangunan Birokrasi di Indonesia, *dengan narasumber Siti Zuhro (LIPI) dan Anwar Sanusi (LAN). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2012.*
- Zuhro, R. Siti. (2010). Good Governance dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Politik, LIPI Vo. 7 No. 1. ejournal.politik.lipi.go.id.

Perundang-Undangan:

UUD 1945
UUD RIS 1949
UUDS 1950
Undang-Undang Pemerintah Daerah:
UU NO. 1/1945
UU No. 22/1948
UU No. 1/1957
Penetapan Presiden No. 6/1959
UU No. 18/1965
UU No. 5/1974
UU No. 22/1999

UU No. 32/2004

UU No. 23/2014.

UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik.

UU No. 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Lampiran dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No-mor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Internet:

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38878388>

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38878388>

<https://news.okezone.com/read/2017/10/10/337/1792856/waduh-kpk-simpulkan-pilkada-serentak-terjerat-politik-transaksional>

<https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pemerintahan-oligarki>.

Diakses pada 28/11/2019. Pukul 16.05 WIB.

<https://medium.com/hipotesa-indonesia/apa-itu-oligarki-e73a7d7e451a>.

Bio Data Penulis

Zulmasyhur



Dilahirkan di Kota Solok, Sumatera Barat, pada Tanggal 21 November. Menyelesaikan Jenjang Sarjana Strata 1, Strata 2, Bidang ilmu Administrasi negara dan menyelesaikan Program Doktor Universitas Padjadjaran Bidang Ilmu Administrasi Publik lulus Tahun 2012. Sebagai dosen tetap Universitas Nasional. Sejak tahun 2016 menjabat Sekretaris Program Studi

Pascasarjana Ilmu Administrasi dan Ketua Pusat Studi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Universitas Nasional. Saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara (ASIAN). Menulis Buku: Sistem Informasi Manajemen Dalam Prespektif Administrasi Negara, Pendidikan Pancasila (Buku Ajar Untuk Perguruan Tinggi), Desentralisasi Formulasi Kebijakan dan Partisipasi Desentralisasi, Fiscal Decentralization and Routine Conflict in Indone-sia, Journal of Applied Enonomics Scence, Issue 4 (58) Volume XIII, Hubungan Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Era Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu dan Budaya, Universitas Nasional. Articles Group Dynamics and Cronyism in Village Development Planning Participation. International Journal for Educational and Vocational Studies (IJEVS) Vo. 1, No. 7 (2019)

Wahyu Triono KS



Dilahirkan di Ophir Pasaman Barat 6 Juli. Menjadi Sekretaris Pusat Penelitian, Pendampingan, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (P5M) Universitas Nasional dan Dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Nasional. Wakil Direktur Social Security Development Institute (SSDI), dan Menjadi Pemimpin Redaksi www.jurnalsocialsecurity.com. Menjadi Campaign Assistance di Mc-LEADER Campaign Consultant dan Direktur Operasional BLORA Center yang mendampingi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sebagai Kandidat Presiden RI, 2004. Berpengalaman sebagai konsultan dan surveyor dalam pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Terakhir sebagai Surveyor Ahli Penjajakan Kandidat Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi, yang saat ini menjadi Gubernur Sumatera Utara. *Professionals Campaign and Political Consultant*, Founder dan Chief Executive Officer (CEO) Cinta Indonesia Associate (CIA), Central Informasi Networking Transformasi dan Aspirasi Indonesia (CINTA Indonesia) dan Lembaga Edukasi dan Advokasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat (LEADER). Menulis Buku: 9 Alasan Memilih SBY, SBY Sekarang! Satrio Piningit Di Negeri Tuyul, JK-WIRANTO Pilihan TERHORMAT, Prabowo Subianto Sang Pemimpin Sejati, Buku Kumpulan Puisi Ibu Pertiwi, Bersama Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc menulis Buku Solusi Untuk Negeri Gagasan dan Pemikiran Tentang Jaminan Sosial dan Kebangsaan, Buku Wajah Demokrasi Indonesia. Menjadi Editor Buku: Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari dan Kembali Ke UUD 1945 (Penulis Dr. Emir Soendoro, SpOT), Buku Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia, Transformasi BPJS: "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan", Mutu Pekerja Sosial Di Era Otonomi Daerah, Dinamika Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Era SJSN, Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan, Buku

Solusi Untuk Negeri Analisis Masalah Negara dan Jaminan Sosial, Lintasan Terjal Jaminan Sosial Analisis Perjalanan 5 Tahun BPJS, Potret Penyelenggaraan Negara Pengalaman Empiris Kebijakan Publik (Penulis Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc). Buku BPJS Jalan Panjang Mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (Penulis dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp.An). Buku Membangun Desa Modern Bersama Telkomsel (Penulis Siswanto Dasijo), Buku Sistem Informasi Manajemen Dalam Perspektif Ilmu Administrasi (Penulis: Zulmasyhur, Eko Sugianto, Bhakti Nur Avianto). Buku Desentralisasi Formulasi Kebijakan dan Partisipasi (Penulis: Andi Yusran, Zulmasyhur, Bhakti Nur Avianto). Buku Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi (Penulis: Zulmasyhur, Dkk). Buku Peran Ganda Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Penulis: Dr. Agnes Wirdayanti, S.IP., M.Si). Buku Jejak Langkah Inspiratif Abdul Haris, S.H. Dari Kabupaten Kepulauan Anambas Membangun Perbatasan Indonesia (Penulis: Abdul Haris, S.H). Menyelesaikan Pendidikan di SD Negeri Inpres Simpang Tiga, SMP Negeri Simpang Tiga Ophir, Pernah Belajar di SMA Negeri Pasaman, Lulus SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping. Menyelesaikan Sarjana Matematika FMIPA Universitas Negeri Medan, *Short Course* Manajemen Kampanye dan Konsultan Politik, AAPC USA, Magister Ilmu Administrasi Pasca Sarjana Universitas Nasional. Menjadi Ketua Umum HMI Cabang Medan 1998-1999, Ketua PB HMI 2002-2004, Koordinator MPK PB HMI 2004-2006 dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP KNPI 2008-2011. Wakil Sekretaris Jenderal GM FKPPI. Menikah dengan Yusmiti Tarmizi, dikaruniai dua putri: Fitri Azzahra Wahyu, Tsara Najwa Wahyu dan satu orang putra Fathan Hermawan Wahyu.

Melalui konstitusi dan perundang-undangan pemerintahan daerah yang berkali-kali mengalami perubahan kita bisa mengetahui bagaimana sejarah dan perjalanan sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan dijalankan di Indonesia. Begitu juga dengan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer dengan menerapkan demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal dan demokrasi di era reformasi. Secara lebih mendalam buku ini juga mengkaji tentang praktik desentralisasi ditinjau berdasarkan regulasi dan undang-undang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dikaitkan dengan hubungan pemerintahan pusat dan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), reformasi birokrasi dan kemandirian daerah di Indonesia. Melalui buku ini juga diuraikan tentang bagaimana praktik demokrasi lokal di Indonesia, berbagai permasalahan dan problem yang dihadapi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak, begitu juga dengan munculnya berbagai gejala oligarki model baru dan preferensi pemilih dalam praktik demokrasi. Begitu juga dengan praktik demokrasi mestilah melahirkan keteladanan dan pengorbanan dari para pemimpin dan semua pembangunan demokrasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, membangun masyarakat madani (*civil society*) dan masa depan bangsa dengan tantangan dan momentum strategis berupa bonus demografi yang terkandung pula di dalamnya persoalan penanganan lansia sebagai wujud Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat.

Penerbit:



ISBN 978-602-52023-8-4

